

ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN LAHAN PERUMAHAN DI PUSAT PELAYANAN KOTA (PPK) KOTA DEPOK (STUDI KASUS: KECAMATAN PANCORAN MAS DAN KECAMATAN SUKMAJAYA)

Asri Budiarto⁽¹⁾, Marselly Dwiputri⁽²⁾, Rizki Hambali⁽³⁾

¹Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur

Asribudiarto@gmail.com

²Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur

Marselly_dwiputri@yahoo.com

³Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur

Rizkihambali@gmail.com

Abstract:

The attraction of urban life and the life of the higher demands caused the population of Indonesia are turning to stay and activities in urban areas. The concentration of urban population needs to be addressed and anticipated early recall of some urban areas will appear. In its development, urban infrastructure, residential aspects should be the spearhead in the urban development often contributes to serious problems for urban life. Many problems originated from the aspect of urban settlements and urban infrastructure, like the share of land for housing needs with the availability of land so that the limited capacity of the land for housing and settlements, These issues often become latent problems not handled optimally. PPK Depok, inhabited by the population with human resources (HR) good quality and a high degree of social heterogeneity, both from the aspect of economy, education and governance guidelines. On the other hand the compact housing activities also cause irregularity residential area so that there is an area with a very high population density and limited land for housing this research seeks to identify and analyze the need of land for housing in the city of Depok PPK to can know the level of the land needs a means of settlement in PPK Depok to 10 years. In this study the author does a descriptive quantitative research methods. Researchers use quantitative data are presented with numbers and words and qualitative in form of words or explanation.

Key Words: Land Requirements, Population, PPK Depok City, Projection Facilities And Infrastructure

Abstrak :

Daya tarik kehidupan perkotaan dan tuntutan kehidupan yang semakin tinggi menyebabkan penduduk Indonesia yang beralih untuk tinggal dan beraktivitas di kawasan perkotaan. Konsentrasi penduduk perkotaan perlu disikapi dan diantisipasi lebih awal karena beberapa persoalan wilayah perkotaan yang akan muncul. Dalam perkembangannya, aspek perumahan dalam pembangunan perkotaan seringkali menyumbang persoalan bagi kehidupan perkotaan itu sendiri, bermula dari aspek permukiman dan infrastruktur perkotaan, seperti tidak seimbang kebutuhan lahan untuk perumahan dengan ketersediaan lahan sehingga terbatasnya daya tampung lahan untuk perumahan dan permukiman, Masalah ini seringkali menjadi persoalan yang tidak tertangani secara optimal. PPK Kota Depok dihuni oleh penduduk dengan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi, baik dari aspek ekonomi, pendidikan dan tata pergaulan. Padatnya aktifitas perumahan menyebabkan ketidakteraturan kawasan perumahan sehingga mendapat kawasan dengan kepadatan penduduk sangat tinggi dan keterbatasan lahan perumahan. Dalam penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan lahan untuk sarana perumahan di PPK Kota Depok agar dapat mengetahui tingkat kebutuhan lahan sarana permukiman di PPK Kota Depok sampai 10 tahun kedepan. Metode penelitian dengan deskriptif kuantitatif menggunakan data kuantitatif yang disajikan dengan angka dan kata-kata dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Ketersediaan daya tampung lahan untuk perumahan di PPK Kota Depok yaitu Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2016 umumnya sudah tidak dapat tertampung, hampir seluruh kelurahan memiliki masalah keterbatasan lahan untuk perumahan penduduk di PPK Kota Depok pada tahun 2016, yaitu terdapat di Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Depok, Kelurahan, dan Kelurahan Mekarjaya. Kekurangan lahan perumahan terbesar terdapat di Kelurahan Tirtajaya

Kata-kunci : Kependudukan, Kebutuhan Lahan, PPK Kota Depok, Proyeksi Sarana dan Prasarana

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah penduduk pada suatu kawasan membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan papan beserta fasilitas penunjangnya. Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat secara alamiah

seiring kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti kebutuhan untuk aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan aktivitas pelayanan umum. Dari fenomena tersebut menuntut pula pembangunan sarana dan prasarana pada suatu kawasan guna menjaga kelangsungan hidup

masyarakat di daerah perkotaan dalam rangka menuju kota berkelanjutan (*Sustainable Cities*)

Kota Depok mendorong Kawasan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Depok untuk terus berkembang. Dari data RTRW Kota Depok Tahun 2014-2034 menyebutkan tingkat pertumbuhan penduduk terus bertambah tiap tahunnya. Selain itu, perkembangan kecamatan ini dapat juga dilihat dari ketetapan RTRW Kota Depok menetapkan Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Beji sebagai pusat pelayanan primer yang melayani seluruh wilayah Kota Depok, dalam hal ini PPK Kota Depok menjadikan salah satu titik pertumbuhan (*growing points*) di Kota Depok.

Guna menciptakan lingkungan permukiman yang berkembang, daya tampung untuk perumahan dan permukiman di PPK Kota Depok harus memadai. Hal ini yang kemudian menjadi suatu pertanyaan bagaimana ketersediaan lahan permukiman di PPK Kota Depok. Sehingga perlu dianalisis ketersediaan & kebutuhan lahan permukiman yang kemudian menjadi rekomendasi untuk pihak terkait dalam menyediakan lahan perumahan dan permukiman di PPK Kota Depok.

Kajian Teori

Pengertian Tata Guna Lahan

Tata guna lahan adalah pengaturan mengenai penggunaan lahan dimana memerlukan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. terdiri dari lahan terbangun dan lahan terbuka (Markus, 2006)

Perumahan

Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. (Sumber: UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Standar Nasional Indonesia tentang Penataan Sarana Permukiman

SNI penataan sarana permukiman merupakan kerangka acuan yang berfungsi sebagai perencanaan, perancangan serta kebutuhan sarana dalam ruang. Penentuan asumsi dasar satuan unit lingkungan dapat dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi konteks lokal yang telah dimiliki. Berdasarkan

SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan No. 03-1733-2004 terdapat asumsi dasar sebagai berikut :

- Jumlah penghuni rumah rata-rata : 5 jiwa
- bila 1 kk terkecil rata-rata terdiri dari 5 orang (ayah + ibu + 3 anak) maka kebutuhan luas lantai minimum dihitung sebagai berikut :
 - Luas lantai utama = $(2 \times 9,6) + (3 \times 4,8) \text{ m}^2 = 33,6 \text{ m}^2$
 - Luas lantai pelayanan = $50\% \times 33,6 \text{ m}^2 = 16,8 \text{ m}^2$ - Total Luas Lantai = 51 m^2
- Jika koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kaveling minimum untuk keluarga dengan anggota 5 orang adalah sebesar 100 m^2

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang Analisis proyeksi Kebutuhan lahan Perumahan dan Permukiman. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan Observasi lapangan, Dokumentasi, serta simak dokumen. Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif-kuantitatif. Peneliti menggunakan data kuantitatif. dimana data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Namun peneliti juga menggunakan data kualitatif yang merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan. Selain itu penulis menggunakan analisis spasial dimana sebagai acuan menyajikan data dalam bentuk Peta.

Analisis proyeksi

Perkiraan kebutuhan Sarana permukiman tergantung dari jumlah penduduk. Untuk itu data jumlah penduduk pada daerah yang dikaji sangat diperlukan dari tahun ke tahun untuk di proyeksikan pada tahun-tahun yang akan datang. Hasil analisis pertumbuhan penduduk ini, Guna mendapat hasil kebutuhan sarana dalam 5 tahun kedepan, peneliti menggunakan analisis proyeksi geometrik. Selanjutnya di pergunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan lahan Sarana perumahan dan permukiman. beberapa faktor yang sangat mempengaruhi proyeksi kebutuhan Sarana Permukiman adalah

- Jumlah penduduk
 - Kecepatan pertumbuhan penduduk
 - Kurun waktu proyeksi
- Rumus Geometrik
 $P_n = P_o [1 + r]^n$
 P_n = penduduk pada tahun n
 P_o = penduduk pada tahun awal
1 = angka konstanta

r = angka pertumbuhan penduduk (dalam persen)
 n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n

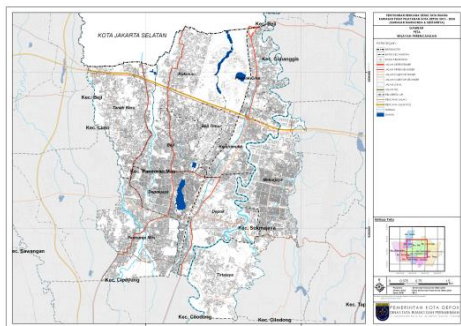
HASIL DAN PEMBAHASAN
Luas Wilayah

Lokasi penelitian di Kawasan Pusat Pelayanan Kota Depok adalah lahan seluas kurang lebih 1.530 Ha yang berada di 2 (dua) Kecamatan yang berada di Kecamatan Pancoran Mas dan Sukmajaya, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Lokasi Kawasan Penelitian

No	N	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
1	2	Pancoran Mas	Depok	3
			Depok	1
			Pancor	3
2	·	Sukmajaya	Mekari	3
			Tirtajaya	3
Jumlah				1

Sumber : RTRW Kota Depok, 2014



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
 Sumber : Peneliti, 2018

Proyeksi Jumlah Penduduk

Pada tabel dibawah ini menunjukkan Proyeksi jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2026 berdasarkan data jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2012-2016

Tabel 2. Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016

KECAMATAN / KELURAHAN	2012	2013	2014	2015	2016
PANCORAN MAS	119.809	125.056	130.533	136.249	142.215
Pancoran Mas	55.310	57.732	60.260	62.899	65.653
Depok Jaya	27.990	29.216	30.496	31.831	33.225
Depok	36.509	38.108	39.777	41.519	43.337
SUKMAJAYA	110.927	115.786	120.856	126.148	131.672
Mekarjaya	98.361	102.669	107.165	111.857	116.756
Tirtajaya	12.566	13.117	13.691	14.291	14.916

Sumber : Depok Dalam Angka, 2017

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2012 sampai pada tahun 2016, jumlah penduduk

terbesar terdapat di kelurahan Mekarjaya yaitu sebanyak 116.756 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kelurahan Depok jaya yaitu sebanyak 14.916 jiwa

Tabel 3. Proyeksi Jumlah Penduduk

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	2016	2021	2026
I	PANCORAN MAS	142.215	176.203	218.314
1	Pancoran Mas	65.653	81.344	100.784
2	Depok Jaya	33.225	41.165	51.004
3	Depok	43.337	53.694	66.526
II	SUKMAJAYA	131.672	163.141	202.130
1	Mekarjaya	116.756	144.660	179.232
2	Tirtajaya	14.916	18.481	22.898

Berdasarkan hasil analisis proyeksi jumlah penduduk PPK Kota Depok per 10 (sepuluh) tahun sampai pada Tahun 2026, jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya sebanyak 179.232 jiwa dan terendah berada di Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya sebanyak 22.898 jiwa

Tabel 4. Kepadatan Penduduk Tahun 2016-2026

NO	KELURAHAN / KECAMATAN	2016	2021	2026
I	PANCORAN MAS	586	726	900
1	Pancoran Mas	188	232	288
2	Depok Jaya	280	347	430
3	Depok	118	147	182
II	SUKMAJAYA	411	508	630
1	Mekarjaya	359	444	551
2	Tirtajaya	52	64	79
PPK KOTA DEPOK		997	1234	1530

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan hasil analisis kepadatan penduduk PPK Kota Depok Tahun 2026, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Depok jaya Kecamatan pancoran Mas sebanyak 430 jiwa/ha dan terendah berada di Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya sebanyak 79 jiwa/ha

Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kota Depok Tahun 2014-2034 dapat diketahui pada penggunaan lahan di PPK Kota Depok Berdasarkan penggunaan lahan bahwa terjadi perubahan fungsi lahan dari kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun. Bukan hanya luas lahan untuk permukiman yang mengalami peningkatan akan tetapi terjadi juga pada guna lahan lain, seperti perdagangan dan jasa yang mengalami

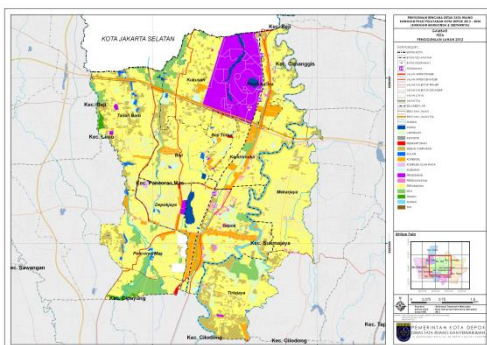
peningkatan yaitu pada tahun 2009 luasnya sebesar 96,01 Ha dan pada tahun 2014 menjadi 120,54 Ha. Perubahan luas lahan pada guna lahan perdagangan dapat menyebabkan pengurangan pada guna lahan lain, terjadi pengurangan pada guna lahan RTNH yang terjadi di hampir seluruh kelurahan, begitupun dengan sawah yang mengalami penurunan luas lahan yang terjadi di Pancoran Mas. Untuk kebun campuran hampir di seluruh kelurahan mengalami penurunan luas lahan. Sedangkan penggunaan lahan yang mengalami peningkatan luas yaitu Perdagangan dan Jasa dan Permukiman.

Berkembangnya permukiman di Kawasan PPK Kota Depok membawa dampak yang cukup besar terhadap beralihnya fungsi lahan pertanian ke permukiman sehingga perlu adanya pembatasan dalam pemberian ijin untuk pengembangan perumahan terutama pada lahan-lahan yang berfungsi sebagai sawah irigasi, selain itu juga pengembangan perumahan di Kawasan PPK Kota Depok harus sudah mengarah ke pembangunan perumahan secara vertikal.

Tabel 5. Tata Guna Lahan Perumahan PPK Depok Tahun 2016 Dalam Hektar (Ha)

No	Kelurahan	Perumahan /Permukiman
I	Pancoran Mas	432,85
1	Pancoran Mas	180,46
2	Depok Jaya	90,42
3	Depok	161,97
II	Sukmajaya	287,8
1	Tirtajaya	70,45
2	Mekarjaya	217,35
Jumlah		720,65

Sumber : Pemerintah Kota Depok, 2017



Gambar 1. Peta Guna Lahan
Sumber : Peneliti, 2014

Analisis Kebutuhan Unit Rumah

Terdapat kebutuhan unit perumahan dilihat dari standar SNI Perumahan Lingkungan yaitu 1 unit rumah Per 1 KK (Kepala Keluarga)

sebanyak 5 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 6. Kebutuhan Unit Rumah Tahun 2016

NO	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Unit Rumah
II	PANCORAN MAS	142.215	28.443
1	Pancoran Mas	65.653	13.131
2	Depok Jaya	33.225	6.645
3	Depok	43.337	8.667
III	SUKMAJAYA	131.672	26.334
1	Mekarjaya	116.756	23.351
2	Tirtajaya	14.916	2.983
Jumlah		273.887	54.777

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Kebutuhan unit rumah terbesar pada tahun 2016 terdapat di Kelurahan Mekarjaya yaitu sebanyak 23.351 unit rumah, sedangkan kebutuhan unit rumah terendah terdapat di Kelurahan Tirtajaya yaitu sebanyak 2.983 unit rumah di PPK Kota Depok.

Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan Unit Rumah

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Unit Rumah
II	PANCORAN MAS	218.314	43.663
1	Pancoran Mas	100.784	20.157
2	Depok Jaya	51.004	10.201
3	Depok	66.526	13.305
III	SUKMAJAYA	202.130	40.426
1	Mekarjaya	179.232	35.846
2	Tirtajaya	22.898	4.580
Jumlah		420.444	84.089

Berdasarkan data diatas diketahui kebutuhan unit rumah terbesar pada tahun 2026 terdapat di Kelurahan Mekarjaya yaitu sebanyak 35.846 unit rumah, sedangkan kebutuhan unit rumah terendah terdapat di Kelurahan Tirtajaya yaitu sebanyak 4.580 unit rumah di PPK Kota Depok.

Analisis Kebutuhan Lahan Perumahan

Ketersediaan lahan untuk kebutuhan sarana perumahan di PPK Kota Depok berdasarkan hasil populasi penduduk sampai pada 10 (sepuluh) tahun kedepan dengan menggunakan skenario kebutuhan lahan perumahan 1 : 3 : 6.

Skenario kebutuhan lahan ini berdasarkan RDTR Kota Depok Tahun 2013-2034, yaitu Rencana kebutuhan perumahan di lokasi perencanaan akan berpatokan pada asumsi sebagai berikut:

- Konsep Penyediaan Perumahan : 1 : 3 : 6
- 1 KK : 5 Orang
- Kavling Kepadatan Tinggi : 150 m²
- Kavling Kepadatan Sedang : 140 m²

e. Kavling Kepadatan Rendah : 120 m²

Untuk lebih jelas dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 8. Kebutuhan Luas Lahan Perumahan Tahun 2016

NO	Kecamatan / Kelurahan	2016	Jumlah KK	Kebutuhan Luas (ha)		
				150	140	120
PANCORAN						
II	MAS	142.215	28.443	42,66	119,46	204,79
1	Pancoran Mas	65.653	13.131	19,70	55,15	94,54
2	Depok Jaya	33.225	6.645	9,98	27,92	47,84
3	Depok	43.337	8.667	13,01	36,40	62,40
III SUKMAJAYA						
1	Mekarjaya	116.756	23.351	35,03	98,07	168,13
2	Tirtajaya	14.916	2.983	4,47	12,53	21,48
Jumlah		273.887	54.777	164,33	460,12	788,80

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan data diatas diketahui kebutuhan luas lahan terbesar untuk sarana perumahan di PPK Kota Depok pada tahun 2016 terdapat di Kelurahan Mekarjaya yaitu sebesar 301,23 Ha, sedangkan kebutuhan luas lahan terendah terdapat di Kelurahan Tirtajaya yaitu sebesar 38,48 Ha di PPK Kota Depok.

Analisis Perbandingan Kebutuhan Luas Lahan Perumahan Tahun 2016 dan Tahun 2026

Proyeksi kebutuhan luas lahan perumahan PPK Kota Depok pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 10. Perbandingan Kebutuhan Luas Lahan Perumahan Tahun 2016

No	Kelurahan	Penggunaan Lahan (Ha)		
		Luas Guna Lahan perumahan Tahun 2016	Kebutuhan Luas Untuk Perumahan	Perbandingan Berdasarkan Proyeksi dan Eksisting
I	Pancoran Mas	432,85	366,91	65,94
1	Pancoran Mas	180,46	169,38	11,08
2	Depok Jaya	90,42	85,74	4,68
3	Depok	161,97	111,81	50,16
II	Sukmajaya	287,8	339,71	-51,91
1	Tirtajaya	70,45	301,23	-230,78
2	Mekarjaya	217,35	38,48	178,87
Jumlah		720,65	1413,26	

Berdasarkan tabel diatas diketahui ketersediaan lahan untuk perumahan di PPK Kota Depok tahun 2106, berdasarkan perbandingan eksisting dan proyeksi kebutuhan lahan, terdapat kelurahan yang memiliki masalah keterbatasan lahan untuk perumahan penduduk di PPK Kota Depok, yaitu terdapat di Kelurahan Tirtajaya di Kecamatan Sukmajaya, terdapat keterbatasan daya tampung untuk perumahan sebesar 230,78 Ha. Sedangkan untuk kelurahan lainnya masih dapat menampung untuk sarana perumahan di PPK Kota Depok.

Berdasarkan perbandingan daya tampung atau ketersediaan luas lahan perumahan antara luas eksisting (Supply) untuk guna lahan perumahan dan kebutuhan luas lahan (Demand) yang harus

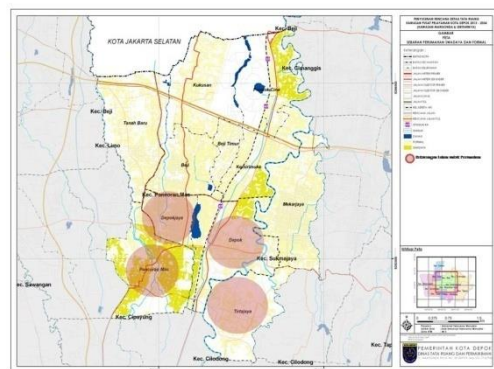
dipenuhi pemerintah Kota Depok pada tahun 2026 dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 11. Perbandingan Kebutuhan Luas Guna Lahan Perumahan PPK Kota Depok Tahun

No	Kelurahan	Penggunaan Lahan (Ha)		
		Luas Guna Lahan perumahan Tahun 2016	Kebutuhan Luas Untuk Perumahan	Perbandingan Berdasarkan Proyeksi dan Eksisting
I	Pancoran Mas	432,85	563,25	-130,4
1	Pancoran Mas	180,46	260,03	-79,57
2	Depok Jaya	90,42	131,58	-41,16
3	Depok	161,97	171,65	-9,68
II	Sukmajaya	287,8	521,51	-233,71
1	Tirtajaya	70,45	462,43	-391,98
2	Mekarjaya	217,35	59,08	158,27
Jumlah		720,65	2169,53	

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui ketersediaan lahan untuk perumahan di PPK Kota Depok tahun 2026, berdasarkan perbandingan eksisting dan proyeksi kebutuhan lahan, hampir seluruh kelurahan memiliki masalah keterbatasan lahan untuk perumahan penduduk di PPK Kota Depok pada tahun 2016, yaitu terdapat di Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Depok, Kelurahan, dan Kelurahan Mekarjaya. Kekurangan lahan perumahan terbesar terdapat di Kelurahan Tirtajaya sebesar 391,98 Ha. Sedangkan untuk kelurahan Mekarjaya berdasarkan hasil analisis untuk daya tampung lahan masih memadai, yaitu sebesar 158,27. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta dibawah ini sebagai berikut :



Gambar 2. Peta Kebutuhan Lahan untuk Perumahan Tahun 2026

PENUTUP

Simpulan

1. Ketersediaan daya tampung lahan untuk perumahan di PPK Kota Depok yaitu Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2016 umumnya telah memadai, hanya 1 kelurahan saja yang tidak dapat menampung lahan untuk perumahan

dan permukiman yaitu di Kelurahan Tirtajaya sebesar 230,78 Ha.

2. Ketersediaan daya tampung lahan untuk perumahan di PPK Kota Depok yaitu Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2026 umumnya sudah tidak dapat tertampung, hanya 1 kelurahan saja yang masih menampung lahan untuk perumahan dan permukiman yaitu di Kelurahan Mekarjaya sebesar 158,27 Ha.
3. Berdasarkan RDTR Kota Depok akan direncanakan pengembangan perumahan vertikal yang bertujuan untuk mengarahkan pengembangan perumahan di PPK Kota Depok agar tidak berkembang secara sporadis, diperkirakan pengembangan perumahan horizontal harus dibatasi, hal ini disebabkan penggunaan lahan yang masih dapat dimanfaatkan sudah tidak dapat menampung kebutuhan perumahan. Maka perumahan akan diarahkan menjadi perumahan vertikal, misalnya rumah susun (rusunawa, rusunami, dan rusuna) maupun apartemen.

Saran

1. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk sarana yang belum tersedia di kecamatan di PPK Kota Depok khususnya sarana kesehatan. Dengan ketersediaan kebutuhan fasilitas tersebut, diharapkan pelayanannya dapat menjangkau seluruh lingkungan permukiman yang ada di kecamatan di PPK Kota Depok
2. Perlu adanya evaluasi dari pemerintah untuk kebutuhan luas lahan perumahan dan permukiman yang tidak merata antara satu Kelurahan dengan kelurahan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, Badan Standarisasi Nasional. 2004. *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan*. Bandung: Penerbit Badan Standarisasi Nasional.
- Anonimous, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 *Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman*.
- Anonimous, Undang-Undang No 4 Tahun 1992 *tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Clark, Isobel. 2001. *Practical Geostatistics*. Central Scotland: Geostokos Limited.

Lembaga Demografi FE UI. 1981. *Dasar-dasar demografi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Lembaga Fakultas UI.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Yunus, S.H. 1982, 1999. *Struktur Tata ruang kota*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara PerencanaanLingkunganPerumahan di Perkotaan. BSN

Zahnd, Markus. (2006). *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.